

LAMPIRAN XXV  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH  
TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan dengan telah ditetapkan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul maka saat ini kelembagaan yang menangani urusan kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang didalamnya terdapat UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Gunungkidul.

Sebagai salah satu institusi dalam Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul terpilih perlu disusun rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan tentang perlunya perencanaan strategis di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Gunungkidul terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja, sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memuat arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya dengan pengembangan pada beberapa kebijakan untuk mendukung visi dan misi Bupati Gunungkidul secara sistematis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Alur proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan melalui proses sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik;
2. Proses Politik; dan
3. Penetapan Renstra.

Penjelasan atas proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Proses Teknokratik

Rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif

dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul dan RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mengacu pada rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJP Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 yaitu periode pembangunan 2021-2025, oleh karena itu penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

## 2. Proses Politik

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Bupati terpilih.

Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

### 1) Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (*platform*) Bupati atau Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun berdasarkan Teknokratik Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan mempertimbangkan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

### 2) Penelaahan Renstra.

Penelaahan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan BAPPEDA.

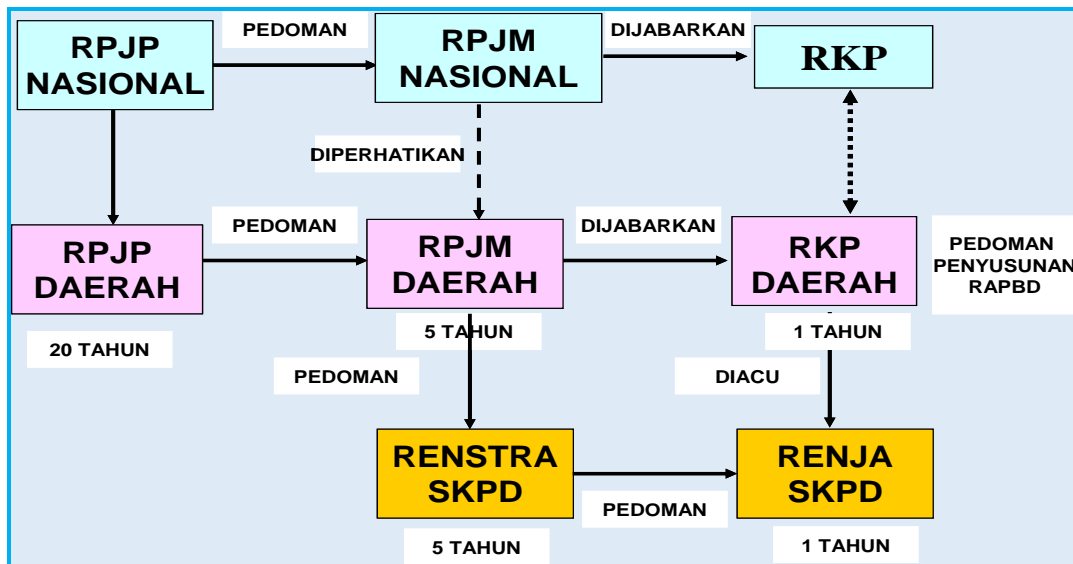
Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- a. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program serta kegiatan yang telah memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah.
- b. BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul memperhatikan :
  - 1) Penjabaran sasaran prioritas Bupati dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul ke dalam sasaran strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  - 2) Konsistensi penjabaran kebijakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul;
  - 3) Konsistensi program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gunungkidul;
  - 4) Sinergi antara sasaran keluaran (*output*) kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan sasaran hasil (*outcome*) program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul.

### 3) Penetapan Renstra

RPJMD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi dan ditetapkan menjadi Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1

### Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul, dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul, terkait dengan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJM dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan maksud agar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai pedoman perencanaan strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara efektif dan efisien.

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan program dan kegiatan pembangunan bidang kepegawaian tahun 2021-2026, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2021-2026.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

#### BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, sedangkan uraian tugas dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 117 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Tugas :

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 disebutkan bahwa :

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Fungsi :

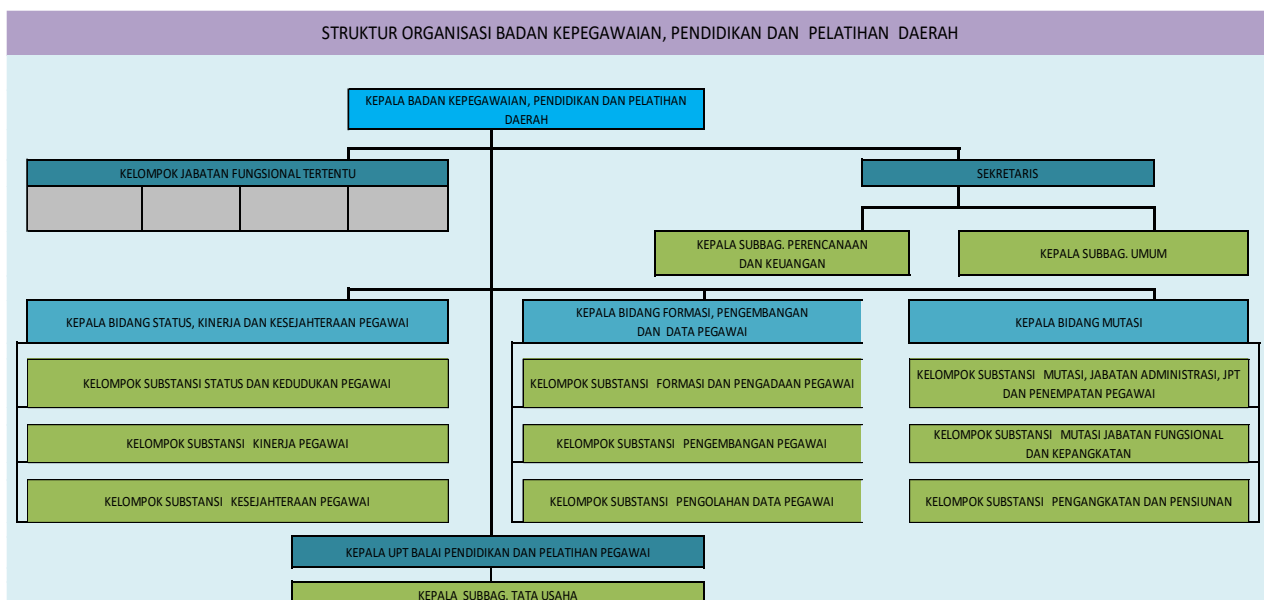
- a. perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumusan kebijakan umum di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- d. pembinaan status, kedudukan pegawai, dan peningkatan kinerja pegawai;
- e. pelaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN dan fasilitasi pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai ASN;
- g. pengolahan data dan sistem informasi ASN;
- h. penyelenggaraan pengembangan pegawai ASN;

- i. penyiapan bahan pengangkatan, mutasi jabatan administrasi, JPT dan fungsional, penempatan, kepangkatan, dan pensiun PNS Daerah;
- j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan
- m. pengelolaan UPT.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Status, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Status dan Kedudukan Pegawai;
  - 2. Kelompok Substansi Kinerja Pegawai
  - 3. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pegawai
- d. Bidang Formasi, Pengembangan dan Data Pegawai terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Formasi dan Pengadaan Pegawai;
  - 2. Kelompok Substansi Pengembangan Pegawai;
  - 3. Kelompok Substansi Pengolahan Data Pegawai;
- e. Bidang Mutasi terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Mutasi Jabatan Administrasi, JPT dan Penempatan Pegawai;
  - 2. Kelompok Substansi Mutasi Jabatan Fungsional dan Kepangkatan;
  - 3. Kelompok Substansi Pengangkatan dan Pensiun;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## h. Bagan Struktur Organisasi BKPPD



### 2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1

Komposisi PNS berdasarkan Jabatan, pangkat dan golongan

Jabatan	Pangkat/Gol	Jumlah
Kepala	Pembina, IV/a	1
Sekretaris	Pembina, IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	2
	Penata Tk I, III/d	1
Kepala Subbagian	Penata Tk I, III/d	2
Kepala UPT	Penata, III/c	1
Kepala Subbagian TU UPT	Penata Muda Tk. I, III/b	1
Fungsional Umum 26	Penata Tk. I, III/d	1
	Penata, III/c	1
	Penata Muda Tk.I, III/b	7
	Penata Muda, III/a	5
	Pengatur Tk. I, II/d	4
	Pengatur, II/c	5
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
	Pengatur Muda, II/a	1
Fungsional Tertentu	Pembina, IV/a	1
	Penata Tk I, Gol. III/d	6
	Penata , Gol. III/c	2
	Penata Muda Tk.I, III / b	2
	Penata Muda, III/a	1
	Pengatur, II / c	1
Jumlah		47

Sumber : Data SIMPEG 2022

Tabel 2.2  
Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SMA sederajat	13
Diploma III	5
S 1	23
S 2	5
S3	1
Jumlah	47

*Sumber : Data SIMPEG tahun 2022*

Dari data tersebut di atas dapat disampaikan bahwa sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah masih belum sesuai dengan kebutuhan baik kuantitas maupun kualitasnya. Sesuai dengan peta jabatan Untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan secara optimal sesuai dengan analisis beban kerja maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah membutuhkan 80 orang.

#### 2.2.2 Aset/ Modal/ Perlengkapan

Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah diperoleh dari dua sumber, yaitu dari APBD dan dari luar/ non APBD. Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah berupa sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kelancaran tugas di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Pemanfaatan aset dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan optimalisasi dari aset yang ada untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan juga untuk menunjang pelayanan di bidang kepegawaian.

Pengelolaan aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset dimaksud meliputi (1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, (2) pengadaan, (3) penggunaan, (4) pemanfaatan, (5) pengamanan dan pemeliharaan, (6) penilaian, (7) penghapusan, (8) pemindahtanganan, (9) penatausahaan, dan (10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Profil aset yang berisikan informasi singkat tentang kondisi eksisting aset di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta potensi pemanfaatan aset di masa yang akan datang adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Bidang Barang	Jumlah	Kondisi Barang				Nilai Barang
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	TANAH	4					25.126.560,00
1	Tanah	4	Baik	-	-	-	25.126.560,00
B	PERALATAN & MESIN	1.045					3.402.090.927,00
1	Alat-alat Angkutan	22	Baik	-	-	-	1.116.508.500,00
2	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Baik	-	-	-	15.085.000,00
3	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	861	Baik	-	-	-	1.061.464.811,00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	36	Baik	-	-	-	204.247.160,00
5	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	2	Baik	-	-	-	5.000.000,00
6	Komputer	108	Baik	-	-	-	987.311.456,00
7	Peralatan Olahraga	15	Baik	-	-	-	12.474.000,00
C	GEDUNG DAN BANGUNAN	7					9.527.171.742,65
1	Bangunan Gedung	5	Baik	-	-	-	9.075.266.972,88
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2	Baik	-	-	-	451.904.769,77
D	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6					12.215.000,00
1	Instalasi	1	Baik	-	-	-	400.000,00
2	Jaringan	5	Baik	-	-	-	11.815.000,00
E	ASET TETAP LAINNYA	232					19.691.800,00
1	Bahan Perpustakaan	232	Baik	-	-	-	19.691.800,00
	JUMLAH	1.294					12.986.296.029,65

Sumber : Data Laporan Aset tahun 2020

Kondisi aset/sarana prasarana yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagian besar dalam kondisi yang baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas, walaupun beberapa aset pada saat ini sudah mengalami penurunan kondisi sehingga membutuhkan biaya untuk perawatan/pemeliharaan. Dari sisi jenis dan jumlahnya masih diperlukan tambahan sarana dan

prasarana seperti komputer/laptop, mebeleir, kendaraan roda dua, dan sebagainya.

### 2.3.Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian di Kabupaten Gunungkidul, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dihadapkan pada kondisi SDM yang terus mengalami kekurangan. Hal ini tentu berdampak pada kinerja organisasi dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2019 sebanyak 8.354 orang. Permasalahan kurangnya jumlah PNS karena tidak seimbangnya jumlah PNS yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah PNS yang masuk. Meskipun pada tahun 2019 terdapat pengadaan PNS sejumlah 388 orang, namun jumlah total PNS pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018.

Tabel 2.3  
Jumlah Penurunan dan Penambahan PNS  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019

NO	URAIAN	TAHUN						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PNS	10.358	10.118	8.683	8.375	8.354	8081	7605
2	Jumlah penurunan Jumlah PNS dari tahun sebelumnya	246	240	1.435	308	21	273	476
3	Pengurangan (jml 3a s.d. 3f)	292	268	1.625	333	425	520	498
a.	Pensiun	263	244	284	241	386	452	427
b.	Diberhentikan atas permintaan sendiri	6	4	3	5	9	7	7
c.	Meninggal Dunia	8	9	10	10	14	38	52
d.	Mutasi Luar Daerah	12	10	1327	75	14	22	9
e.	Pemberhentian dengan hak pensiun	2	1	1	2	-	0	2
f.	Pemberhentian tanpa hak pensiun	1	-	-	-	2	1	1
4	Penambahan (jml 4a s.d. 4b)	46	28	190	25	404	247	22
a.	CPNS	36	0	73	0	388	245	0
b.	Mutasi Masuk	10	28	117	25	16	2	22

Sumber : SIMPEG BKPPD tahun 2021

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam perencanaan strategis tahun 2016-2021 sebagai organisasi perangkat daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang di dalamnya memuat target/sasaran sampai dengan tahun 2021 dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Target/sasaran yang telah ditetapkan telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Keterangan
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Persentase Kenaikan pangkat dan pension PNS tepat waktu serta pengangkatan dan pemindahan PNS sesuai formasi.	100			100	100	100	100	100	100	99,4	99,6	98,75	na	100	99,4	99,6	98,75	na	
2	Persentase pengiriman peserta diklat dan tugas belajar sesuai kebutuhan..	100			100	100	100	100	100	100	86,9	100	100	na	100	86,9	100	100	na	
3	Persentase pelanggaran dan kasus yang terselesaikan.	100			100	100	100	100	100	100	100	100	100	na	100	100	100	100	na	

Sumber : LKjIP tahun 2017-2020

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pelayanan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2016-2021 termasuk dalam kategori sangat baik (91% - 100%). Hal ini dapat dicapai dengan adanya komitmen yang tinggi yang dimiliki oleh seluruh komponen yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai lembaga pelayanan di bidang kepegawaian.

Selanjutnya untuk capaian realisasi anggaran dapat disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah**  
**Kabupaten Gunungkidul**  
**Tahun 2016-2021**

Kode Rekening	PROGRAM dan KEGIATAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun					Rata2 Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.04.01.01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	668.741.500	533.063.400	979.662.500	402.026.800		597.209.298	459.657.909	887.169.383	367.006.150		89,30	86,23	90,56	91,29		-88.904.900	-76.734.382
4.04.01.01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	577.386.500	391.448.400	795.387.500	364.264.400		515.954.098	329.717.659	741.319.487	330.163.680		89,36	84,23	93,20	90,64		-71.040.700	-61.930.139
4.04.01.01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi	91.355.000	141.615.000	184.275.000	37.762.400		81.255.200	129.940.250	145.849.896	36.842.470		88,94	91,76	79,15	97,56		-17.864.200	-14.804.243
4.04.01.02	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>	957.817.500	279.700.000	246.050.000	63.200.000		905.982.915	274.178.145	224.371.572	59.666.663		94,59	98,03	91,19	94,41		-298.205.833	-282.105.418
4.04.01.02.01	Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	832.217.500	160.200.000	112.650.000	0		797.102.273	158.378.709	111.403.500	0		95,78	98,86	98,89	0		-277.405.833	-265.700.758
4.04.01.02.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	125.600.000	119.500.000	133.400.000	63.200.000		108.880.642	115.799.436	112.968.072	59.666.663		86,69	96,90	84,68	94,41		-20.800.000	-16.404.660
4.04.01.03	<i>Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur</i>	77.070.000	25.620.000	84.390.000	700.000		64.908.260	18.464.700	74.292.500	699.500		84,22	72,07	88,03	99,93		-64.590.000	-21.402.920
4.04.01.03.02	Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	860.000	1.000.000	700.000		860.960	819.000	992.500	699.500		86,10	95,23	99,25	99,93		-100.000	-53.820
4.04.01.03.03	Pengembangan Kapasitas Aparatur	76.070.000	24.760.000	83.390.000	0		64.047.300	17.645.700	73.300.000	0		84,20	71,27	87,90	0		-64.490.000	-21.349.100
4.04.01.04	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	52.300.000	56.500.000	12.800.000	9.100.000		52.297.600	56.440.850	12.799.850	9.002.900		100,00	99,90	100,00	98,93		-14.400.000	-14.431.567
4.04.01.04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	52.300.000	56.500.000	12.800.000	9.100.000		52.297.600	56.440.850	12.799.850	9.002.900		100,00	99,90	100,00	98,93		-14.400.000	-14.431.567
4.04.01.05	<i>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</i>	17.662.500	20.100.000	30.825.000	13.450.000		17.648.400	19.767.900	30.824.500	<b>13.449.350</b>		99,92	98,35	100,00	100		-1.404.166	-1.422.917

4.04.01.05.01	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	14.350.000	13.550.000	18.625.000	9.300.000	14.350.000	13.464.300	18.625.000	9.299.400		100,00	99,37	100,00	99,99		-1.683.333	-1.706.867
4.04.01.05.02	Pengendalian Internal Perangkat Daerah	812.500	4.850.000	11.300.000	3.450.000	798.500	4.614.000	11.299.500	3.449.950		98,28	95,13	100,00	100		879.167	883.817
4.04.01.05.03	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	2.500.000	1.700.000	900.000	700.000	2.499.900	1.689.600	900.000	700.000		100,00	99,39	100,00	100		-600.000	-599.867
4.04.01.06	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</i>	<i>600.000</i>	<i>2.010.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>850.000</i>	<i>588.400</i>	<i>1.991.000</i>	<i>1.747.000</i>	<i>840.000</i>		<i>98,07</i>	<i>99,05</i>	<i>99,83</i>	<i>98,82</i>		<i>83.333</i>	<i>83.867</i>
4.04.01.06.01	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	600.000	2.010.000	1.750.000	850.000	588.400	1.991.000	1.747.000	840.000		98,07	99,05	99,83	98,82		83.333	83.867
4.04.01.15	<i>Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur</i>	<i>368.955.500</i>	<i>307.261.200</i>	<i>2.121.315.500</i>	<i>48.027.000</i>	<i>329.051.565</i>	<i>268.695.400</i>	<i>1.976.359.019</i>	<i>47.341.250</i>		<i>89,18</i>	<i>87,45</i>	<i>93,17</i>	<i>98,57</i>		<i>-106.976.167</i>	<i>-93.903.438</i>
4.04.01.15.01	Pembinaan Disiplin Pegawai, Pelaporan, dan Pemenuhan Identitas Pegawai	159.460.500	131.820.500	108.725.500	15.587.500	143.562.100	111.383.900	95.527.607	15.293.750		90,03	84,50	87,86	98,12		-47.957.667	-42.756.117
4.04.01.15.02	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai dan Penghargaan Pegawai	82.950.000	77.014.700	49.540.000	19.799.500	69.010.965	65.067.100	39.178.926	19.683.500		83,20	84,49	79,09	99,41		-21.050.167	-16.442.488
4.04.01.15.03	Pembinaan Fasilitas Penilaian Prestasi Kerja PNS	126.545.000	98.426.000	49.450.000	12.640.000	116.478.500	92.244.400	45.249.486	12.364.000		92,05	93,72	91,51	97,82		-37.968.333	-34.704.833
4.04.01.15.04	Pengadaan Pakaian Dinas	0	0	1.913.600.000	0	0	0	1.796.403.000	0		0	0	93,88	0		0	0
4.04.01.16	<i>Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai</i>	<i>2.290.971.500</i>	<i>2.840.314.100</i>	<i>5.263.647.500</i>	<i>1.429.314.300</i>	<i>1.892.614.075</i>	<i>2.435.085.310</i>	<i>4.972.487.978</i>	<i>1.354.589.000</i>		<i>82,61</i>	<i>85,73</i>	<i>94,47</i>	<i>94,77</i>		<i>-286.732.367</i>	<i>-179.121.692</i>
4.04.01.16.01	Pengembangan Kompetensi Pegawai	871.525.000	1.667.782.200	4.352.266.600	856.420.400	818.484.400	1.432.081.680	4.323.787.800	842.118.400		93,91	85,87	99,35	98,33		-5.034.867	7.878.000
4.04.01.16.02	Pengadaan Pegawai	438.210.000	372.137.900	322.705.000	379.284.000	117.344.300	227.041.150	95.787.300	319.381.100		26,78	61,01	29,68	84,21		-19.641.967	67.345.600
4.04.01.16.03	Pengelolaan Data ASN	93.016.500	93.679.000	99.070.900	5.135.900	87.357.725	86.743.380	91.420.250	4.930.500		93,92	92,60	92,28	96,00		-29.293.533	-27.475.742
4.04.01.16.04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	886.760.000	706.715.000	489.605.000	188.474.000	868.767.650	689.219.100	461.492.628	188.159.000		97,97	97,52	94,26	99,83		-232.762.000	-226.869.550
4.04.01.16.05	Penyelenggaraan Seleksi dan Pengiriman Peserta Pendidikan Ikatan Dinas	1.460.000	0	0	0	660.000	0	0	0		45,21	0	0	0		0	0
4.04.01.17	<i>Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS</i>	<i>1.182.710.000</i>	<i>688.818.400</i>	<i>585.920.000</i>	<i>162.810.200</i>	<i>964.517.925</i>	<i>533.521.895</i>	<i>343.324.100</i>	<i>139.904.735</i>		<i>81,55</i>	<i>77,45</i>	<i>58,60</i>	<i>85,93</i>		<i>-339.799.933</i>	<i>274.871.079</i>

4.04.01.17.01	Pengangkatan dan Penempatan Jabatan Administrasi	170.140.000	132.733.600	131.920.000	36.785.000		159.433.300	112.798.050	118.816.250	23.725.035		93,71	84,98	90,07	64,50		-44.451.667	-45.236.088
4.04.01.17.02	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	755.350.000	291.477.300	259.880.000	49.060.000		564.981.625	224.551.105	64.177.200	47.460.000		74,80	77,04	24,69	96,74		-235.430.000	-172.507.225
4.04.01.17.03	Pemrosesan Pengangkatan dan Pensiun PNS	133.690.000	149.608.000	94.130.000	19.261.200		123.029.400	97.726.100	71.795.450	17.368.700		92,03	65,32	76,27	90,17		-38.142.933	-35.220.233
4.04.01.17.04	Mutasi dan Kenaikan Pangkat dan Jabatan PNS	123.530.000	114.999.500	99.990.000	57.704.000		117.073.600	98.446.640	88.535.200	51.351.000		94,77	85,61	88,54	88,99		-21.775.333	-21.907.533
	Jumlah	5.616.828.500	4.753.387.100	9.326.360.500	2.129.478.300		4.824.818.438	4.067.803.109	8.523.375.902	1.992.499.548		85,90	85,58	91,39	93,57		-1.162.450.066	-944.106.297

Sumber : Laporan Keuangan tahun 2017-2020

Dari tabel tersebut di atas dapat disampaikan bahwa capaian realisasi keuangan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah pada umumnya dapat tercapai dengan baik. Perlu di sampaikan juga bahwa sebagian kegiatan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah terkait dengan instansi lain sehingga capaian realisasinya tidak hanya ditentukan sendiri oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Kondisi ini seringkali menyebabkan beberapa kegiatan tersebut capaian kinerjanya menjadi kurang maksimal.

Selain itu keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor yang dominan dalam pencapaian target program dan kegiatan, seperti pada kegiatan pengembangan kompetensi pegawai, penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional maupun kegiatan lain yang memerlukan anggaran cukup besar dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait dengan pelayanan kepegawaian.

Pencapaian IKU pembinaan profesionalisme ASN lingkup Kabupaten Gunungkidul adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Pembinaan Profesionalisme ASN

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	100	100	95,4	99,8	99,58

*Sumber: Data Realisasi Indikator pada RPJMD Perubahan Kabupaten Gunungkidul 2016-2021, dan LKjIP 2020.*

Sedangkan untuk pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021 hingga tahun 2020 dapat disampaikan bahwa rata-rata tingkat capaian sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah termasuk kategori Sangat Tinggi. Indikator sasaran yang melebihi target pada tahun 2020 yakni Nilai IKM Perangkat Daerah yang ditargetkan sebesar 79,5 dapat tercapai sebesar 84,17.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dalam menjalankan manajemen kepegawaian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi pelayanan meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas sumber daya aparatur, penempatan, promosi, penggajian dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Fungsi tersebut dalam rumusan teknis meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kepegawaian tersebut terdapat beberapa faktor eksternal yang merupakan tantangan dan peluang bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam merumuskan rencana strategis lima tahun ke depan.

Tantangan merupakan potensi masalah dari eksternal yang berada di luar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian rencana strategis dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Selama beberapa tahun ke depan, tantangan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Dinamika politik lokal dan nasional yang dapat berpengaruh dalam komitmen pengembangan sumber daya aparatur.
- 2) Kebijakan minus growth dalam pengadaan pegawai sehingga berdampak pada kekurangan SDM.
- 3) Belum adanya pola karier ASN.
- 4) Belum adanya remunerasi untuk ASN pada Pemerintah Daerah.
- 5) Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat .
- 6) Komitmen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM yang belum memadai.

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang merupakan potensi eksternal yang berada di luar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang pencapaian rencana strategis dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Peluang yang ada, diantaranya :

- 1) Komitmen Pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dengan melakukan reformasi birokrasi.

- 2) Kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 3) Adanya lembaga / instansi yang dapat bekerja sama dalam pengembangan dan peningkatan kualitas SDM, seperti Lembaga Diklat, Perguruan Tinggi dan lain-lain.
- 4) Kerjasama kemitraan dalam proses pelayanan kepegawaian (Taspen, Askes, Taperum).
- 5) Perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu pelayanan kepegawaian.
- 6) Adanya permohonan PNS dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian, terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya kebutuhan pegawai karena alokasi pengadaan ASN sangat kurang.
2. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai jabatannya
3. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian berbasis IT.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi adalah suatu pernyataan tentang pandangan jauh ke depan yang berisi arah dan tujuan organisasi di masa mendatang. Visi akan memberikan kekuatan, semangat, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Penyusunan visi mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026.”

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- 2) Meningkatkan pembangunan manusia dan potensi daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul yaitu misi : Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam menjalankan pelayanan di bidang kepegawaian yang merupakan faktor internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul. Faktor-faktor tersebut termasuk didalamnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, diantaranya adalah :

a. Faktor penghambat :

- Terbatasnya sumber daya aparatur.
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.
- Sistem pelayanan kepegawaian belum dilaksanakan secara optimal.

b. Faktor pendorong :

- Adanya regulasi terkait dengan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Adanya lembaga yang memberikan fasilitas untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- Pengembangan aplikasi pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Salah satu Kementrian yang tugas pokok dan fungsinya cukup relevan dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategisnya, visi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi. Sedangkan salah satu misi yang akan dilaksanakan adalah Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif.

Visi dan misi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sangat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menangani masalah kekurangan pegawai, kompetensi pegawai serta pengembangan sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

a. Faktor penghambat :

SAPK yang ada di BKN belum terintegrasi dengan SIMPEG yang ada di BKPPD Kabupaten Gunungkidul.

b. Faktor pendorong :

Tersedianya sistem pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi.

Pada renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan visi yaitu Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya, dengan misi Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur.

Rumusan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada tujuan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

a. Faktor penghambat :

- Terbatasnya sumber daya aparatur
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.
- SIMPEG BKPPD Kabupaten Gunungkidul tidak terintegrasi dengan SIMPEG BKD DIY.

b. Faktor pendorong :

- Adanya regulasi terkait dengan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Adanya lembaga yang memberikan fasilitas untuk pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- Pola koordinasi dan sinkronisasi data yang terjalin antara BKPPD Kabupaten Gunungkidul dengan BKD DIY.

### 3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai peran yang cukup strategis, terutama dalam penyediaan sumber daya aparatur yang mengelola program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu sasaran yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam rencana strategis adalah aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.

Berkaitan dengan KLHS, bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan yang salah satu diantaranya adalah pengembangan kawasan wisata pantai. Hal tersebut tentu harus didukung dengan sumber daya manusia khususnya aparatur yang kompeten dalam bidang tersebut.

Jumlah PNS pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Permasalahan kurangnya jumlah PNS disebabkan karena tidak seimbangnya jumlah PNS yang pensiun, meninggal, mengundurkan diri, dan mutasi keluar daerah dengan jumlah PNS yang masuk. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir sudah ada penerimaan ASN namun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah ASN yang pensiun

#### a. Faktor penghambat :

- Terbatasnya SDM.
- Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya.

#### b. Faktor pendorong :

- Kebijakan pengadaan ASN baik PNS maupun PPPK.
- Kerjasama dengan instansi penyelenggara diklat.

### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, maka dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi isu strategis yang harus mendapatkan perhatian dan ditangani secara berkelanjutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Kebutuhan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
2. Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan kinerja ASN
3. Optimalisasi aplikasi APIK dalam mendukung pelayanan kepegawaian berbasis tehnologi informasi.

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan dicapai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Gunungkidul adalah :

”Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional”

Selanjutnya rumusan tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator dan Target Kinerja Tujuan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Renstra (Tahun 2021)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2026)
1.	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026	99,58	100 %

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah serta Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	81,25	81,35	81,45	81,65	81,75

Tabel 4.3

## Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Unit kerja penanggung jawab	Keterangan/ Rumus/ Formula
			1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	100	100	100	100	100	Bidang Mutasi, Bidang FPDP, Bidang SKKP, UPT Balai Diklat Pegawai	Hasil rata-rata dari : 1. Persentase kenaikan pangkat dan pensiun PNS tepat waktu serta pemindahan PNS yang sesuai kompetensi 2. Persentase ASN yang meningkat kompetensinya. 3. Persentase Kasus ASN yang terselesaikan

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

#### 5.1 Perumusan Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Dari berbagai permasalahan yang dimungkinkan timbul dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepegawaian. Faktor-faktor baik internal maupun eksternal tersebut selanjutnya menjadi bahan analisis untuk mengatasi kelemahan (faktor internal) dan ancaman (faktor eksternal) sehingga melahirkan strategi dari hasil analisis tersebut.

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Dalam hal ini dilakukan melalui metode analisis Matriks SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats*).

Berikut merupakan bagian dari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dalam analisis kekuatan internal dan eksternal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah:

##### 1. Faktor internal :

###### a. Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Komitmen pimpinan untuk peningkatan kualitas SDM.
- 2) Tersedianya SDM dengan kinerja yang baik.
- 3) Adanya UPT Balai Diklat Pegawai.
- 4) Adanya uraian tupoksi yang jelas.

###### c. Kelemahan (*weaknesses*) :

- 1) Sarana dan prasarana belum memadai.
- 2) Kurangnya jumlah SDM.
- 3) Simpeg belum terintegrasi.
- 4) Arsip kepegawaian belum tertata dengan baik.

##### 2. Faktor Eksternal

###### a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Banyaknya tawaran untuk diklat dan tugas belajar ASN.
- 2) Tehnologi informasi yang semakin berkembang.

3) Kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

4) Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

b. Tantangan (*Threats*) :

1) Tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN

2) Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

3) Kebijakan pembatasan Penerimaan ASN.

4) Tuntutan publik terhadap pelayanan kepegawaian yang semakin baik.

Selanjutnya dilakukan pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal sehingga menghasilkan strategi yang akan dilakukan. Penentuan strategi yang menggunakan formula analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Penentuan Alternatif Strategi dengan analisis SWOT

Faktor Eksternal	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya tawaran untuk diklat dan tugas belajar ASN.</li> <li>2. Tehnologi informasi yang semakin berkembang.</li> <li>3. Kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.</li> <li>4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.</li> </ol>	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan peningkatan kesejahteraan ASN</li> <li>2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.</li> <li>3. Kebijakan moratorium Penerimaan ASN.</li> <li>4. Tuntutan publik terhadap pelayanan kepegawaian yang semakin baik.</li> </ol>
Faktor Internal	<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan untuk peningkatan kualitas sumber daya aparatur</li> <li>2. Tersedianya SDM dengan kinerja yang baik.</li> <li>3. Adanya UPT Balai Diklat Pegawai.</li> <li>4. Adanya uraian tupoksi yang jelas.</li> </ol>	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat.</li> <li>2. Meningkatkan kinerja SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian yang semakin baik.</li> <li>3. Pemberdayaan aparatur setelah mengikuti diklat.</li> <li>4. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional</li> <li>5. Pembinaan ASN.</li> </ol>
<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana belum memadai.</li> <li>2. Kurangnya jumlah SDM.</li> <li>3. Simpeg belum terintegrasi.</li> <li>4. Arsip kepegawaian belum tertata dengan baik.</li> </ol>	<p>Peluang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.</li> <li>2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.</li> <li>3. Penataan arsip kepegawaian sesuai kemajuan tehnologi informasi.</li> <li>4. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki.</li> <li>5. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai.</li> </ol>	<p>Tantangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang semakin baik.</li> <li>2. Penataan ASN yang sesuai kompetensi untuk mengatasi moratorium penerimaan ASN.</li> <li>3. Pengembangan fungsi SIMPEG untuk meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian.</li> <li>4. Penataan arsip manual sehingga mendukung pelayanan arsip kepegawaian yang lebih baik.</li> <li>5. Pengadaan outsourcing dan tenaga harian lepas untuk menunjang kebersihan dan keamanan kantor.</li> </ol>

Identifikasi strategi dari hasil analisis SWOT :

A. STRATEGI SO

1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pemberian izin belajar dan tugas belajar.
2. Membangun kerjasama dengan lembaga lain dalam pelayanan kepegawaian.
3. Mengembangkan pola kemitraan untuk penyelenggaraan diklat.
4. Menyenggarakan diklat bagi ASN sesuai dengan kebutuhan.
5. Meningkatkan kualitas SDM aparatur agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menghadapi implementasi UU ASN.

B. STRATEGI WO

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.
3. Penataan arsip kepegawaian sesuai kemajuan teknologi informasi.
4. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki.
5. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai.

C. STRATEGI ST

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat.
2. Meningkatkan kinerja SDM untuk memenuhi tuntutan pelayanan kepegawaian yang semakin baik.
3. Pemberdayaan aparatur setelah mengikuti diklat.
4. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional
5. Pembinaan ASN.

D. STRATEGI WT

1. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang semakin baik.
2. Penataan ASN yang sesuai kompetensi.
3. Pengembangan fungsi SIMPEG untuk meningkatkan mutu pelayanan kepegawaian.
4. Penataan arsip manual sehingga mendukung pelayanan arsip kepegawaian yang lebih baik.
5. Pengadaan outsourcing dan tenaga harian lepas untuk menunjang kebersihan dan keamanan kantor.

Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel berikut :

Tabel 5.2  
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat.	Indeks profesionalitas ASN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pemberian ijin belajar dan tugas belajar.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat</li> <li>3. Mengembangkan pola kemitraan untuk penyelenggaraan diklat.</li> <li>4. Pemenuhan SDM melalui pengadaan ASN</li> <li>5. Penataan ASN yang sesuai kompetensi</li> <li>6. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional</li> <li>7. Pembinaan ASN.</li> <li>8. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.</li> </ol>

## 5.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Aparatur yang kompeten dan profesional meningkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi ASN melalui pemberian ijin belajar dan tugas belajar.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM dengan penyelenggaraan diklat</li> <li>3. Mengembangkan pola</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar aparatur.</li> <li>2. Penyelenggaraan Diklat Aparatur.</li> <li>3. Membangun jejaring</li> </ol>

		<p>kemitraan untuk penyelenggaraan diklat aparat.</p> <p>4. Pemenuhan SDM melalui pengadaan Pegawai.</p> <p>5. Penataan ASN yang sesuai kebutuhan.</p> <p>6. Menerapkan reward dan punishment secara proporsional</p> <p>7. Pembinaan ASN.</p> <p>8. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.</p>	<p>dalam penyelenggaraan diklat.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pengadaan pegawai.</p> <p>5. Distribusi ASN sesuai formasi dan kompetensi.</p> <p>6. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.</p> <p>7. Melaksanakan pembinaan disiplin ASN.</p> <p>8. Membangun Sistem informasi yang terintegrasi dan dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.</p>
--	--	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi Organisasi Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran dari perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ada hubungannya dengan segala aspek dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat Organisasi Perangkat Daerah yang berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional Organisasi Perangkat Daerah yang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah  
Periode 2021-2026  
Kabupaten Gunungkidul

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	100	16.615.498.350,00	100	16.210.066.021,00	100	14.077.685.483,00	100	14.316.179.193,00	100	14.672.383.672,00	100	75.891.812.719,00	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD tersusun	29	28	11.400.000,00	34	17.300.000,00	34	22.000.000,00	34	27.000.000,00	35	32.000.000,00	165	1029.700.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase dokumen perencanaan yang tersusun	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	1	1	7.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	7.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen Renja perubahan	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen Renstra	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Pelaksanaan forum PD	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen profil PD	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah draf dokumen profil	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					PD															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	0,00	4	8.000.000	4	8.500.000	4	9.000.000.	4	9.500.000	16	36.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	800.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	800.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	NA	0	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	4	14.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan	1	1	600.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	NA	0	1	1.500.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	5	9.000.000,00	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlahg dokumen ROPK	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen perjanjian kinerja	1	1	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	NA	NA	0	3	2.000.000	3	3.000.000	3	4.000.000	3	5.000.000	12	14.000.000	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	1	1	600.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	600.000	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan Perjanjian Kerja	1	1	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA KPD	NA	NA	0	2	800.000	2	1.000.000	2	1.500.000	2	2.000.000	8	5.300.000	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	NA	NA	0	17	2.000.000	17	3.000.000	17	4.000.000	17	5.000.000	68	14.000.000	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan TEPR	12	12	1.400.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	1.400.000	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah dokumen evaluasi PD (E-Monev)	4	4	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	4	0,00	BKPPD	BKPPD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah dokumen LKJIP	1	1	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	0	6	1.000.000	6	1.500.000	6	2.000.000	6	2.500.000	24	7.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun tepat waktu	28	28	15.894.573.350,00	28	14.507.666.021,00	28	12.658.585.483,00	28	12.735.079.193,00	28	12.761.783.672,00	140	68.557.687.719,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase dokumen laporan keuangan tersusun	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	14	14	15.888.373.350,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	14	15.888.373.350,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	NA	NA	0	672	14.500.166.021,00	672	12.650.335.483,00	672	12.726.079.193,00	672	12.751.783.672,00	2688	52.628.364.369	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	1	1	1.700.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1	1.700.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	NA	NA	0	1	2.000.000	1	2.250.000	1	2.500.000	1	3.000.000	4	9.750.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ	12	12	4.500.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	12	4.500.000	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	(Rp.)		
							Tar get	(Rp.)	Targe t	(Rp.)	Targe t	(Rp.)	Tar get	(Rp.)	Tar get	(Rp.)				
					Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Laporan Keuangan/Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bua Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	NA	NA	0,00	13	5.500.000	13	6.000.000	13	6.500.000	13	7.000.000	52	25.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	53	67	1.000.000,00	132	131.500.000,00	72	47.000.000,00	72	72.500.000,00	132	128.000.000,00	408	380.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah bahan pakaian dinas khusus yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya dibeli	NA	NA	0,00	60	15.000.000,00	0	0,00	60	20.000.000,00	0	0,00	120	35.000.000,00	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani	46	60	1.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	60	1.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah tenaga jabatan fungsional dinilai	7	7	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	7	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	NA	NA	0,00	5	1.500.000	5	2.000.000	5	2.500.000	5	3.000.000	20	9.000.000	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	20	0	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah ASN yang mengikuti capacity building	0	0	0,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	60	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	NA	NA	0,00	60	115.000.000	0	45.000.000	0	50.000.000	60	125.000.000	120	335.000.000	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum terpenuhi	14	14	218.400.000,00	187	418.600.000,00	187	499.600.000	187	500.600.000	187	541.600.000	935	2.178.800.000	BKPPD	BKPPD	
					Persentase administrasi umum terlayani	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik tersedia	10	10	5.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	5	5.000.000	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	NA	NA	0	2	7.000.000,00	10	9.000.000,00	10	11.000.000,00	10	13.000.000,00	8	40.000.000,00	BKPPD	BKPPD	
			X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	4	2	100.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	100.000.000	BKPPD	BKPPD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah kertas dan cover	4	2	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah perabot kantor (box container)	0	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Bahan Komputer (refill toner, tinta printer, flashdisk, CD, mouse)	12	12	0	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	12	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan	NA	NA	0	2	240.000.000	2	297.000.000	2	274.000.000	2	291.000.000	8	1.102.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tanga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	NA	NA	0	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	2	70.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	10	10	20.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	10	20.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah foto kopi	22171	25000	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	25,000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	NA	NA	0,00	4	25.000.000	4	30.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	16	130.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar) tersedia (3 X 12 bulan)	36	36	2.400.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36	2.400.000	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	NA	NA	0	698	3,600,000	698	3,600,000	698	3,600,000	698	3,600,000	2792	14,400,000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanandan minuman tersedia untuk tamu	65	100	6.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	100	6.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah minum snack tersedia untuk tamu	65	100	0,00	NA	0,00	NA	0	NA	0,00	NA	0,00	100	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	NA	NA	0,00	5	8,000,000	5	10,000,000	7	12,000,000	7	14,000,000	24	44,000,000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, konsultasidan koordinasi dalam daerah	67	260	85.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	260	85,000,000	BKPPD	BKPPD
					Frekuensi rapat-rapat, konsultasidan koordinasi luar daerah	15	60	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	60	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah makanandan minuman tersedia untuk rapat	70	400	0,00	NA	0,00	NA	0	NA	0,00	NA	0,00	400	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah minum snack tersedia untuk rapat	210	500	0,00	NA	0,00	NA	0	NA	0,00	NA	0,00	500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	NA	NA	0,00	67	125.000.000.	70	135,000,000	75	145,000,000	80	0,00	292	560,000,000	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana	0	0	0,00	11	465,000,000	17	117,500,000	53	185.000.000	59	350,000,000	140	1,117,500,000	BKPPD	BKPPD
					Persentase pengadaan barang milik daerah terlaksana dengan baik	0	0		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah kursi kerja/putar dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah kursi rapatdibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah meja rapatdibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah paket mebel yang disediakan	NA	NA	0,00	89	120,000,000	6	7,500,000	8	10,000,000	98	150,000,000	201	287,500,500	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah filling kabinet yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah printer yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah TV LED yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laptop yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	0	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah LCD+layar yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah barcode scanner yang dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah PC all in one yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah power distribution yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah switch LAN 24 port yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah scanner yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah PC/komputer yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah printer IDcard yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	NA	NA	0,00	12	120.000.000	5	45.000.000	10	100.000.000	10	115.000.000	37	380.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC dibeli	0	0	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	0	BKPPD	BKPPD	
					Jumlah Genset dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah magnetic white board yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pompa airdibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah rak lemari besi dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah tabung isi ulang pemadam kebakaran yang dibeli	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	NA	7	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang desiakn	NA	NA	0	4	225.000.000	12	65.000.000	12	75.000.000	13	85.000.000	41	450.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kebutuhan jasa penunjang terpenuhi	7	7	285.000.000,00	138	310.000.000,00	138	333.000.000,00	138	356.000.000,00	138	379.000.000,00	690	1.663.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1760	1000	25.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	1000	25.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat	NA	NA	0,00	12	30.000.000	12	38.000.000	12	46.000.000	12	54.000.000	48	168.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon terbayar	36	36	170.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	36	170.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah rekening internet terbayar	24	24	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	24	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah rekening air terbayar	24	24	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah rekening listrik terbayar	36	36	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	36	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik yang digunakan	NA	NA	0,00	120	190.000.000	120	200.000.000	120	210.000.000	120	220.000.000	480	820.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa kebersihan dibayar	6	6	90.000.000	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6	90.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah bahan & peralatan kebersihan	5	2	0,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	2	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	NA	NA	0,00	6	90.000.000	6	95.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	24	390.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah terlaksana	11	16	204.375.000,00	18	360.000.000,00	17	400.000.000,00	15	440.000.000,00	14	480.000.000,00	80	1.884.375.000,00	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil dinas yang dipelihara	6	6	120.000.000,00	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	6	120.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah mobil dinas yang terbayar pajaknya	6	6	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah motor dinas yang dipelihara	15	15	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	15	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah motor dinas yang terbayar pajaknya	15	15	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	15	0	BKPPD	BKPPD
					Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perzinannya	NA	NA	0,00	63	145.000.000	63	155.000.000	63	165.000.000	63	175.000.000	252	640.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah CCTV terfasilitasi pemeliharaannya	2	2	9.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	9.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah komputer terfasilitasi pemeliharaannya	3	10	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	10	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah laptop terfasilitasi pemeliharaannya	5	10	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	10	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah LCD terfasilitasi pemeliharaannya	1	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah mesin tik terfasilitasi pemeliharaannya	0	3	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	3	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah printer terfasilitasi pemeliharaannya	3	10	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	10	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah TV terfasilitasi pemeliharaannya	2	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	2	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya	NA	NA	0,00	45	15.000.000	15	20.000.000	45	25.000.000	45	30.000.000	180	90.000.000	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					yang dipelihara															
			X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Na	Na	0	3	100.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000	13	490.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atas bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Na	Na	0	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	15	75.000.000	60	225.000.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Backdrop ruang pertemuan	0	0	75.375.000	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	75.375.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah AC dipelihara	0	15	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	15	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah keramik yang diperbaiki	0	100	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	100	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pengecatan gedung kantor	0	800	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	800	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah gypsum yang diperbaiki	0	50	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	50	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pintu yang diperbaiki	0	3	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	3	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah slot pintuyang diperbaiki	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ruang parkir kendaraan	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah sekat ruang	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	0	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kanrtor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Na	NA	0,00	1	50.000.000	3	55.000.000	3	70.000.000	3	60.000.000	10	235.000.PPP	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	5	6	750.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	6	750.000	BKPPD	BKPPD
			X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana	Jumlah dokumen evaluasi SOP	1	1	750.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	1	750.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen evaluasi standar pelayanan	1	1	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	1	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen laporan penyelenggaraa n SKM	1	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	2	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah rencana tindak pengendalian (SPIP)	2	2	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	2	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	(Rp.)		
							Tar get	(Rp.)	Targe t	(R p.)	Targe t	(Rp.)	Tar get	(Rp.)	Tar get	(Rp.)				
			4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	0	100	334.100.000,00	100	340.000.000,00	100	345.000.000,00	100	350.000.000,00	100	355.000.000,00	100	1.724.100.000,00	BKPPD	BKPPD
			4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah ASN yang lulus diklat keistimewaan	0	150	334.100.000,00	150	340.000.000,00	150	345.000.000,00	150	350.000.000,00	150	355.000.000,00	750	1.724.100.000,00	BKPPD	BKPPD
			4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mengikuti Diklat Internalisasi Keistimewaan	0	150	334.100.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	0	334.100.000	BKPPD	BKPPD
			4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang mengikuti Diklat Internalisasi Keistimewaan	NA	NA	0	4	340.000.000	4	345.000.000,00	4	350.000.000	5	355.000.000,00	18	1.390.000.000.	BKPPD	BKPPD
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Aparatur yang kompeten dan profesional Meningkat	Indeks profesionalitas ASN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase terlaksananya layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	99.58	100	4.533.870.000,00	100	5.341.000.000,00	100	7.576.000.000,00	100	7.736.000.000,00	100	7.903.000.000,00	100	33.089.870.000,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya datayang up to date	3372	5560	935.000.000,00	5640	1.035.000.000,00	5650	1.095.000.000,00	5700	1.155.000.000,00	5700	1.215.000.000,00	28250	5.435.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase pengadaan pegawai sesuai formasi, pensiun tepat waktu dan tersedianya datayang up to date	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
			5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta pemberkasan pegawai	244	300	900.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	300	900.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta seleksi pengadaan pegawai	2688	4500	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	4500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah usulan formasi pegawai	6	4	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	4	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah Dolumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	NA	NA	0	7	950.000.000	7	1.000.000.000	7	1.050.000.000.	7	1.100.000.000	28	4.100.000.000	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah SK pensiun ASN	440	380	12.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	380	12.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta pembekalan purna bhakti bagi ASN	0	380	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0	380	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen analisis kebutuhan tenaga kontrak PD	1	2	23.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	10	273.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah DUK dan daftar nominatif ASN	314	314	0,00	314	0,00	314	0,00	314	0,00	314	0,00	1570	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah laporan statistik kepegawaian	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	20	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pemeliharaan tatanaskah kepegawaian	9000	8500	0,00	8500	0,00	8500	0,00	8500	0,00	8500	0,00	42500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah profil ASN	3000	2000	0,00	2000	0,00	2000	0,00	2000	0,00	2000	0,00	10000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pemuthakiran data ASN	6000	8000	0,00	8000	0,00	8000	0,00	8000	0,00	8000	0,00	40000	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai kompetensi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu	2389	2746	311.870.000,00	2870	367.000.000,00	2930	383.000.000,00	2980	397.000.000,00	2980	415.000.000,00	14506	1.873.870.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase pengisian jabatan struktural dan mutasi ASN sesuai formasi serta kenaikan pangkat ASN tepat waktu	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN alih tugas	302	200	20.000.000,00	200	25.000.000,00	200	28.000.000,00	200	30.000.000,00	200	35.000.000,00	1000	138.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang mengajukan mutasi keluar dan masuk wilayah Gunungkidul	36	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	20	0,00	100	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS	405	248	66.870.000,00	300	82.000.000,00	350	85.000.000,00	350	87.000.000,00	350	90.000.000,00	1598	410.870.000,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk mutasi, pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan jabatan fungsional	311	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	3500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah data ASN yang terverifikasi untuk kenaikan pangkat data crash program/verval data kenaikan pangkat	601	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	4000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah nota pertimbangan kenaikan pangkat yang diterbitkan	601	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	4000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah nota pertimbangan teknis peninjauan masa kerja	1	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	150	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta pengambilan sumpah PNS	413	248	0,00	300	0,00	350	0,00	350	0,00	350	0,00	1598	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pengisian jabatan pengawas dan kepala sekolah	13	100	0,00	120	0,00	130	0,00	130	0,00	130	0,00	610	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pertimbangan TPKPJS	1	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	20	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang dilantik dalam jabatan	178	300	0,00	300	0,00	250	0,00	300	0,00	300	0,00	1450	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra PerangkatDaerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targe t	(Rp.)		
							Tar get	(Rp.)	Targe t	(R p.)	Targe t	(Rp.)	Tar get	(Rp.)	Tar get	(Rp.)				
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pengembangan SDM ASN	625	522	3.175.000.000,00	760	3.788.000.000,00	768	3.848.000.000,00	870	3.908.000.000,00	775	3.968.000.000,00	3692	18.687.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase pengembangan SDM ASN	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat dasar CPNS	0	244	2.788.000.000,00	300	3.288.000.000,00	300	3.338.000.000,00	300	3.388.000.000,00	300	3.438.000.000,00	1444	16.240.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang mengikuti diklat struktural	21	13	0,00	160	0,00	160	0,00	160	0,00	160	0,00	653	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas	0	50	0,00	35	0,00	40	0,00	45	0,00	50	0,00	220	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	100	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN terkirim ijin belajar	340	200	387.000.000,00	250	500.000.000,00	250	510.000.000,00	250	520.000.000,00	250	530.000.000,00	1200	2.447.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN terkirim tugas belajar	4	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	15	0,00	75	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan ASN serta kasus ASN yang terselesaikan	7274	9999	112.000.000,00	9699	151.000.000,00	9399	2.250.000.000,00	9699	2.276.000.000,00	9699	2.305.000.000,00	48495	7.094.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase penilaian kinerja tepat waktu dan pemberian penghargaan	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					ASN serta pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan															
			5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan peningkatan kinerja	160	160	30.000.000,00	160	42.000.000,00	160	45.000.000,00	160	47.000.000,00	160	50.000.000,00	800	214.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah bulan ASN terfasilitasi pengisian buku kerja	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	60	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	6375	8300	0,00	8000	0,00	7700	0,00	8000	0,00	8000	0,00	40000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah unit kerjayang terfasilitasi dalam penyusunan penilaian prestasi kerja	157	157	0,00	157	0,00	157	0,00	157	0,00	157	0,00	785	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah dokumen fasilitasi penerbitan kartu Taspen, Taperumdan cuti PNS	3	3	35.000.000,00	3	50.000.000,00	3	2.140.000.000,00	3	2.160.000.000,00	3	2.180.000.000,00	15	6.565.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen hasil perhitungan TPP	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	60	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah dokumen perbup TPP	2	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	5	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah fasilitasi penerbitan JKK/JKM	0	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	25	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					Jumlah pemrosesan KP4	157	157	0,00	157	0,00	157	0,00	157	0,00	157	0,00	785	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang diuji kesehatan	0	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	20	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah SK KGB kepala PD	23	47	0,00	47	0,00	47	0,00	47	0,00	47	0,00	235	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah SK pemberian tunjangan kesejahteraan ASN	2	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00	25	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah tanda satyaencana karya satya	575	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	2500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah pengadaan bahanpakaian dinas	0	0	0,00	0	0,00	7500	0,00	7500	0,00	7500	0,00	22500	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah CPNS yang mengikuti pembinaan dan orientasi ketugasan	0	400	32.000.000,00	400	42.000.000,00	400	45.000.000,00	400	47.000.000,00	400	50.000.000,00	2000	216.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah penerbitankaris, karsu, karpeg	656	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	3500	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah fasilitasi pengisian LHKPN	83	90	0,00	90	0,00	90	0,00	90	0,00	90	0,00	450	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ID card tercetak	374	1000	0,00	1000	0,00	1000	0,00	1000	0,00	1000	0,00	5000	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta pembinaan ASN	0	170	0,00	170	0,00	170	0,00	170	0,00	170	0,00	850	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
					Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	0	170	0,00	170	0,00	170	0,00	170	0,00	170	0,00	850	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	9	15	15.000.000,00	15	17.000.000,00	15	20.000.000,00	15	22.000.000,00	15	25.000.000,00	75	99.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah penyelesaian kasus perkawinandan perceraian	25	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	25	0,00	125	0,00	BKPPD	BKPPD
			5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensi teknis dan fungsionalnya	100	100	126.000.000,00	100	626.000.000,00	100	676.000.000,00	100	726.000.000,00	100	776.000.000,00	100	2.930.000.000,00	BKPPD	BKPPD
			5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional	60	90	126.000.000,00	300	626.000.000,00	330	676.000.000,00	270	726.000.000,00	240	776.000.000,00	1230	2.930.000.000,00	BKPPD	BKPPD
					Persentase ASN yang lulus diklat teknis dan fungsional	100	100		100		100		100		100		100		BKPPD	BKPPD
			5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta diklat penelitian tindakan kelas	0	30	126.000.000,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	30	126.000.000	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat penelitian tindakan sekolah	60	30	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	30	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat pejaminan mutu sekolah	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat auditor	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perenc.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhirperiode Renstra Perangkat Daerah		PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Rp.)		
							Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)						
					Jumlah peserta diklat pengelola keuangan	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat BLUD bagi pengelola BLUD	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat guru menulis	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat kearsipan	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat pengelola perpustakaan	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat pelayanan publik	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat Satpam	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah peserta diklat dasar pengadaan barang/jasa	0	0	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	NA	0,00	BKPPD	BKPPD
					Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	NA	NA	0,00	330	626.000.000	330	676.000.000	300	726.000.000	240	776.000.000	1200	2.804.000.000	BKPPD	BKPPD
								21.609.468.350		22.517.066.021		22.674.685.483		23.128.179.193		23.706.383.672		113.635.782.719		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam tabel 7.1 di bawah ini :

TABEL 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Tahun 1	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0		Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks profesionalitas ASN	99,58	100	100	100	100	100	100
2.	Nilai AKIP PD	80,5	81,25	81,35	81,45	81,65	81,75	81,75

BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah periode 2021-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ini merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah setiap tahunnya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari stakeholder terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sehingga harapan untuk peningkatan profesionalisme dan mensejahterakan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat terwujud.

RENSTRA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai wujud dari catatan dan harapan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
SUNARYANTA